

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Sosialisasi Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul oleh BKKPPKB tahun 2010- 2011 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. ARG bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. tetapi ARG, lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut, berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan, untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor BKKPPKB Kabupaten dalam pelaksanaan Anggaran yang berbasis Gender yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan berupa pertemuan, rapat kerja, seminar dan workshop, sehingga banyak para birokrat yang mengetahui hal tersebut.
3. Dalam pelaksanaannya, Untuk kantor BKKPPKB Tahun 2010-2011 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia atau birokrat yang ada di kantor tersebut kurang

memahami tentang materi terhadap Anggaran Responsif Gender, sehingga perlu adanya peran serta dari pemerintah maupun seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bantul untuk mengadakan sosialisasi yang lebih mendalam khususnya terkait dengan Anggaran Responsif Gender tersebut.

4. Kegiatan/program yang dilakukan oleh kantor BKKPPKB Kabupaten Bantul dalam menginternalisasikan Program/kegiatan dengan mengadakan pertemuan triwulan bagi perencanaan program yang telah dianalisis gender untuk perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
5. Pada pelaksanaan sosialisasi terhadap Anggaran Responsif Gender Terdapat faktor penghambat dan pendukung yang mana faktor penghambatnya seperti kurangnya sumber daya manusia terhadap pemahaman tentang PUG/PPRG. Jika dilihat pada faktor struktural dimana dalam hal ini kapasitas birokrasinya sendiri, masih terdapat ketidakpahaman terhadap pengimplementasian Anggaran Responsif Gender yang kurang tepat sasaran, sehingga proses sosialisasinya kurang maksimal, disamping itu juga sebagian SKPD dalam hal ini masih kurang memahami anggaran yang berbasis Gender, sehingga perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Anggaran responsif gender, sehingga nantinya kegiatan/ program yang dilaksanakan memang benar-benar sesuai dan tepat sasaran.
6. Dalam hal ini, terdapat faktor pendukungnya yaitu Adanya payung hukum serta adanya antusiasme dari pemerintah pusat dalam mewujudkan Anggaran responsif gender dengan adanya surat Gubernur No.463/0484

tertanggal 17 februari 2010, yang mana dalam kebijakan ini, menegaskan dan mengutkan komitmen pemerintah provinsi daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengimplementasikan anggaran responsif gender dalam proses penganggaran. serta adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mulai memperhatikan masalah Anggaran Responsif Gender dalam setiap kegiatan/program.

7. Adanya alokasi dana dari APBD untuk BKKPPKB dalam menjalankan kegiatan/program yang responsif gender.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

1. Sebelum program yang berbasis pada anggaran responsive gender dilaksanakan sebaiknya diberikan pemahaman kepada pejabat struktural dan birokrat agar pengimplementasian anggaran responsive gender berjalan baik dan tepat sasaran, selain itu diperlukan komitmen yang kuat agar kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi.
2. Untuk SKPD yang ada di Kabupaten Bantul khususnya , agar memiliki data pilah, sehingga kegiata/program yang terkait dengan anggara yang responsif gender benar-benar tepat sasaran.
3. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama berperan aktif dan peduli terhadap masalah Anggaran yang berbasis Gender yang mana dalam hal ini sumberdaya manusianya sendiri perlu

mendapatkan pelatihan yang lebih intens lagi agar dapat mengerti dan memahami tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) dalam pembangunan, selain itu juga perlu adanya reformulasi kebijakan/program/kegiatan di Kabupaten Bantul dan evaluasi anggaran yang responsif gender di setiap SKPD agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.

4. Selain itu juga, diharapkan pada Kantor BKKPPKB harus lebih pro aktif lagi dalam melaksanakan program yang berbasis pada anggaran responsive gender serta meningkatkan pemahaman para birokrat terkait masalah anggaran yang berbasis gender tersebut, sehingga proses pelaksanaan Anggaran responsif gender di BKKPPKB dapat berjalan baik dan maksimal.